



SISTEM REKRUTMEN DAN KADERISASI

PDI PERJUANGAN KABUPATEN KENDAL ERA REFORMASI

(Studi Kasus Oligarki di Kabupaten Kendal)

Rizki Khoiruly¹, Drs. Susilo Utomo, M.Si², Dra. Rina Martini, M.Si³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

Political party is one of democracy consolidation agent which replaces personal-authority based feudalistic system into people-authority based democracy system. Considering the success of democracy consolidation by political party can be measured from good recruitment system and cadre system, clear political party's orientation, and political configuration which is based on principle and method of democracy. This analytical writing starts from the idea of PDI Perjuangan as a big political party in Indonesia which has militant supporter base since this party takes "Soekarnoisme Ideology". PDI Perjuangan is identical with a leadership of Soekarno's offspring by the emergence of Megawati and Puan Maharani within party's leadership. PDI Perjuangan Kendal county is identical as well by the emergence of Hendy Boedoro's family. Twice of governmental election in Kendal county that was held directly won by PDI Perjuangan. The purpose which is going to approach in this reaserch is to know recruitment pattern cadre process, and political institution which is run by PDI Perjuangan Kendal county. Reaserch result shows that it is a tendency into oligarchy culture in PDI Perjuangan Kendal county. This is caused by domination of party leadership by the family of Hendy Boedoro. Party's dependence toward in-charge party's elite to strengthen cultural oligarchy. Such thing can be inffered in party's leader election and candidate election of regent which was held by PDI Perjuangan Kendal county dependent on figures Hendy Boedoro and Widya Kandi Susanti. PDI Perjuangan has centralistic tendency with full authority which is owned by central PDI Perjuangan for policy in county level such as having the right of declaring the chairman who will be advised by PDI Perjuangan.

Keywords: recruitment system, cadre system, oligarchy culture

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya pemerintahan era Orde Baru yang otoriter membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pemilu yang semakin terbuka dari tahun ke tahun. Pemilu tahun 2004 merupakan pengalaman baru bagi Indonesia. Karena baik calon-calon legislatif maupun calon eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Partai politik merupakan salah satu agen konsolidasi demokrasi yang menggantikan sistem feodalistis yang berbasis kekuasaan personal menjadi sistem demokrasi yang berbasis pada kekuasaan rakyat. Menilai keberhasilan konsolidasi demokrasi oleh partai politik dapat dilihat dari pola rekrutmen

¹ Rizki Khoiruly adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang alamat email : rizki_khoiruly@yahoo.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

yang baik, orientasi partai yang jelas, dan konfigurasi politik yang berjalan sebagaimana mestinya yang bertolak dari metode dan prinsip demokrasi. Sedangkan indikator kegagalan konsolidasi demokrasi adalah pola rekrutmen partai politik yang cenderung oligarki sehingga hanya bergantung pada sekelompok elit partai, kultur yang paternalistik dan cenderung ikut kemauan pemimpinnya.

Melalui partai politik sebagai fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik seseorang mengalami proses politik dan dipersiapkan untuk dapat menjadi pemimpin besar. Tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat. Kegagalan proses rekrutmen dan kaderisasi politik akan menciptakan ketergantungan partai pada figur tertentu dan dominasi kekuasaan oleh elit partai. Perilaku elit partai akan menciptakan kecenderungan budaya organisasi politik dalam sistem politiknya.

Terdapat kritik mendasar yang menilai kiprah partai politik yang berperan sebagai pilar atau aktor demokrasi tetapi justru tidak demokratis. Struktur dan kepemimpinan partai politik merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural. Seperti halnya dalam pengambilan kebijakan yang terkadang bersifat sentralistik sebagai perwujudan oligarki, dimana kewenangan menentukan calon kepala daerah berada di tangan pengurus partai pusat. Contoh lain oligarki kiprah partai politik yakni pada proses nominasi, pencalonan, penetapan calon legislatif maupun eksekutif yang diisi berdasarkan kekerabatan atau oleh anak istri dan anggota keluarganya untuk melanggengkan kekuasaannya.

Fenomena ketergantungan partai pada figur tertentu memiliki karakteristik tersendiri seperti figur dominan Megawati Soekarno Putri dalam PDI Perjuangan. Periode 2010-2015 merupakan ketiga kalinya Megawati menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketokohan ini sengaja dibangun atas dasar trah Soekarno yang sengaja dipertahankan untuk merebut simpati masyarakat yang mengagumi ideologi Soekarno. Selain itu hadir pula suami dan putri Megawati yakni Taufik Kiemas sebagai Dewan Pertimbangan Partai dan Puan Maharani dalam kepemimpinan DPP PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sendiri juga terkenal dengan sistem yang sentralistik.

Ditingkat lokal kecenderungan oligarki ini juga terdapat pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal terdapat dominasi kepemimpinan oleh keluarga Hendy Boedoro, yang mana di dalam partai ini Widya Kandi yang merupakan istri Hendy Boedoro juga mengambil peran dalam kepemimpinan partai. Dominasi kepemimpinan di struktural partai ini yang kemudian menciptakan ketergantungan pada elit partai untuk diandalkan dalam pertarungan perebutan kursi kepala daerah maupun legislatif.

Tulisan ini ingin melihat bagaimana rekrutmen, kaderisasi dan pelembagaan politik yang dijalankan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Kendal sebagai salah satu agen konsolidasi demokrasi. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Adapun teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara mendalam kepada kader-kader PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Selain wawancara mendalam, data yang diperoleh juga berasal dari data sekunder yang di dapat dari KPUD Kabupaten Kendal, DPRD Kabupaten Kendal, BPS Kabupaten Kendal dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Partai politiklah yang bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk itu perlu dikembangkannya sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Dengan adanya sistem ini nantinya akan diseleksi antara kesesuaian karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Rekrutmen dan kaderisasi dilakukan secara terus menerus dan terencana sesuai dengan peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen anggota PDI Perjuangan Kabupaten Kendal dilaksanakan secara berkala, bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi khusus. Namun masih terdapat kendala pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan kader pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Dengan keterbatasan dana maka DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal tidak

melaksanakan pendidikan kaderisasi atau diklat (pendidikan kilat) sebagaimana mestinya. Kendala yang dialami tersebut berakibat pada rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh kader PDI Perjuangan Kabupaten Kendal.

PDI Perjuangan Kabupaten Kendal juga telah melaksanakan sistem kaderisasi yang berjenjang. Apabila dilihat dari latar belakang pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, sebagian besar kader ini telah bergabung di PDI Perjuangan dari tingkatan yaang lebih bawah. Seperti sebelumnya aktif pada kepengurusan ranting, anak cabang dan badan pemenangan pemilu. Namun dalam prakteknya ada hal-hal lain yang dapat menjadi pengecualian dalam perjenjangan kaderisasi di PDI Perjuangan. Dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan untuk anggota keluarga atau masyarakat yang militan terhadap PDI Perjuangan, terkenal dan punya prestasi dapat langsung direkrut dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal tanpa harus melalui tahap perjenjangan. Instrumen yang dinilai dalam kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Kendal antara lain prestasi, dedikasi loyalitas, dan nilai lebih yang dimiliki oleh anggota partai seperti popularitasnya di masyarakat dalam kaitannya dengan elektabilitas. Akan tetapi aspek loyalitas, dan nilai lebih dari seorang individu merupakan poin utama dalam kaderisasi di PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Sehingga dalam pelaksanaannya juga tidak menutup kemungkinan kepada seseorang yang belum pernah duduk di kepengurusan tingkat bawah untuk langsung diangkat menjadi kader pada tingkatan DPC partai.

Pada kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal tidak terlepas dari adanya konflik internal. Terjadi perebutan kekuasaan partai pada periode kepemimpinan H.M Salimun yang kemudian dijatuhkan oleh Hendy Boedoro. Pada tahun 2000 H.M Salimun terpilih melalui konfrensi cabang yang diadakan oleh partai. Tahun 2003 karena ada konflik internal partai maka kepemimpinan H.M Salimun digantikan oleh Hendy Boedoro dengan status Plt (Pelaksana tugas). Partai politik memanglah identik dengan kekuasaan, dalam hal ini hingga terjadi adanya perebutan pengaruh oleh pihak H.M Salimun dengan pihak Hendy Boedoro. Terdapat pula intervensi yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Prov. Jawa Tengah oleh Murdoko. Murdoko itu sendiri merupakan saudara kandung dari Hendy Boedoro.

Fenomena yang terjadi pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal ini menunjukkan adanya elit politik yang berkuasa dalam partai. Dapat dilihat bahwa pada PDI Perjuangan Jawa Tengah dan PDI Perjuangan Kabupaten Kendal terdapat elit politik yang mendominasi. Elit politik ini memiliki peran sentral yang dapat mengatur berbagai aspek. Pada kepemimpinan Hendy Boedoro inilah kecenderungan budaya oligarki pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal mulai dominan. Aturan yang ada pada partai banyak yang dimainkan. Seperti orang-orang yang tidak disukainya tidak akan dipakai atau disingkirkan dari struktural partai. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, seorang elit politik ini akan dengan mudah memainkan aturan. Seperti menempatkan orang-orangnya untuk melanggengkan kekuasaannya dan yang tidak disukai tidak dipakai. Sehingga terkadang untuk menjadi kader partai tidak melalui perjenjangan kader akan tetapi dengan kedekatan dengan elit politik ini seseorang dapat diangkat menjadi kader partai.

Intervensi yang dilakukan oleh Murdoko sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah juga menunjukkan adanya sistem politik yang hirarkis. Karena dalam peraturan untuk pengisian jabatan kosong partai, juga diatur bahwa calon ketua DPC diusulkan ke DPP partai dengan rekomendasi DPD partai untuk mendapatkan pengesahan surat ketetapan DPP partai. Adanya mekanisme yang menempatkan DPD sebagai perantara kepada pusat, ini dapat diartikan bahwa DPD partai mempunyai wewenang juga dalam menentukan siapa yang akan direkomendasikan. Pada prakteknya kewenangan yang dimiliki dalam aturan yang hirarkis pada partai ini terkadang disalah gunakan oleh elit politik. Sehingga tidak heran apabila terjadi intervensi dalam konflik kekuasaan yang terjadi pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal.

Dari fenomena yang terjadi pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa partai politik disini dimaknai sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. Dimana tujuan itu adalah kekuasaan politik semata. Padahal, fungsi partai politik dalam hal kaderisasi sangat dibutuhkan sebagai

proses penyiapan bagi pergantian personalia yang nantinya akan berlangsung dalam partai politik. Kader-kader partai ini lah yang nantinya akan menempati jabatan-jabatan legislatif dan eksekutif yang akan bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

PDI Perjuangan dalam kontribusi partai untuk menempatkan orang-orang dalam sistem legislatif memiliki kualifikasi tersendiri. PDI Perjuangan sejak 1999 telah menggunakan sistem skoring dalam prosedur rekrutmen legislatifnya. Instrumen penilaian tersebut berisikan tentang pengabdian di partai, pendidikan, pengalaman jabatan, kompetensi, prestasi, elektabilitas dan konduite (faktor pengurang atas total nilai). Aspek pengabdian pada partai sangat ditekankan dengan adanya sistem skoring. Sehingga kader struktural partai sangat diutamakan. Hal ini diharapkan agar calon yang diusung dapat mewakili visi misi dan platform partai dalam jabatan yang diembannya nanti.

Namun pada praktiknya tidak selamanya sejalan dengan aturan yang ada. Pada pemilu 1999 dan terutama pada 2004, form skoring tidak begitu menentukan, yang memutuskan langsung dari struktur inti DPC partai. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 2009 sistem skoring mulai diterapkan. Apabila pengabdian di partai besar semakin tinggi nilainya, semakin atas nomor urutnya.

Perbedaan dalam pengimplementasian aturan ini dikarenakan pada pemilu 1999 dan 2004 menggunakan sistem nomor urut tertutup. Dengan sistem nomor urut tertutup, calon legislatif dengan nomor urut awal akan memiliki peluang besar untuk duduk di kursi legislatif. Pada pemilu 2009 partai politik tidak berpengaruh banyak karena yang menentukan adalah masyarakat dengan memilih calonnya langsung. Sehingga pada prakteknya pendekatan *bottom-up* masih juga diabaikan. DCS menggambarkan dominasi politisi sentral atau pemegang kekuasaan partai. Dengan sistem nomor urut tertutup ini kecenderungan budaya oligarki terpenjara. Pada budaya oligarki, nomor urut ini dapat diprioritaskan untuk anggota keluarga atau kelompoknya dan dapat diperjual belikan. DCS dipenuhi oleh nama-nama yang dapat diklasifikasikan sebagai anggota keluarga para fungsionaris utama organisasi politik. Apalagi pada waktu itu Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Kendal dijabat oleh Hendy Boedoro yang juga sedang menjabat sebagai Bupati Kendal. Sehingga Widya Kandi juga mendapatkan prioritas nomor urut pada pemilu 2004. Selain itu Asep Diamonde yang merupakan keponakan dari Hendy Boedoro juga mendapatkan prioritas nomor urut pada pemilu legislatif 2004. Padahal keduanya belum menjadi pengurus pada DPC PDIP Kabupaten Kendal..

Dalam rekrutmen eksekutif atau kepala daerah PDI Perjuangan menerapkan beberapa prosedur seperti adanya tahap penjangkaran, verifikasi, penyaringan dan penetapan yang telah diatur. Tahap penyaringan dilakukan oleh pengurus DPC bersama pengurus PAC, pengurus ranting dalam rakercabsus yang dipimpin oleh DPP partai atau DPD yang telah diberi mandat oleh DPP. Dalam rakercabsus PAC dan DPC mengusulkan beberapa nama untuk direkomendasikan oleh pusat. Namun pada tahap penetapan pusat memiliki wewenang penuh dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung.

Dapat dilihat bahwa sistem rekrutmen kepala daerah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini seolah-olah demokratis dengan adanya aspirasi dari bawah. Namun sebenarnya sentralistis, karena wewenang penuh untuk menentukan calon kepala daerah yang diusung ada pada pusat. Dari pola yang seperti itu, sehingga tak heran apabila PDI Perjuangan terkenal dengan sistem yang sentralistis. Setiap partai politik memiliki pola-pola yang berbeda dalam aturan yang dijalankannya. Dalam penetapan calon bupati dan wakilnya, dapat dilihat bahwa pusat memiliki kewenangan besar dalam menentukan calon kepala daerah. Pusat di sini mengacu pada sosok Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang telah menjabat 3 periode. Hal ini menunjukkan adanya pemerintahan yang cenderung oligarki.

Pada pola rekrutmen kepala daerah juga dapat dilihat bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Kendal masih memiliki ketergantungan terhadap ketokohan seseorang. Hal ini terbukti ketika pencalonan bupati dan wakilnya pada tahun 2005 dan 2010. Pilkada tahun 2005 PDI Perjuangan Kabupaten Kendal pada

rakercabsus hanya mengusulkan satu nama yakni Hendy Boedoro (*incumben*). Dan tahun 2010 juga hanya mengusulkan satu nama yakni istri Hendy Bonedoro yaitu Widya Kandi yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Padahal dalam aturan partai, ketika mengusulkan calon kepala daerah sekurang-kurangnya ada empat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih dari hasil verifikasi. Hal ini juga berkaitan dengan strategi partai untuk memperoleh kemenangan dalam perebutan kursi kepala daerah. Pada mekanismenya seharusnya ada calon lain yang diusulkan tapi dibatasi karena terkait strategi partai untuk kemenangan PDIP Kabupaten Kendal.

Ketergantungan pada kedua tokoh PDI Perjuangan Kabupaten Kendal ini terjadi karena hanya keduanya yang memiliki nilai lebih. Baik dari segi popularitas maupun sumber daya lainnya. Besarnya ketergantungan partai pada elit politik tertentu berdampak juga pada pengusungan calon wakil bupati. Krisis kader yang dialami PDI Perjuangan Kabupaten Kendal menyebabkan pada dua kali pilkada tidak dapat mengusung calon wakil bupati dari internal partainya. Melainkan menggandeng calon dari partai lain seperti pilkada 2005 dengan Partai Golkar dan pilkada 2010 dengan PKB. Ketergantungan partai kepada elit politik menunjukkan gagalnya fungsi rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

Kelembagaan PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang, dari gabungan lima fusi partai berideologi nasionalisme, hingga perubahan nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan. Sejalan dengan sejarahnya, PDI Perjuangan ini memiliki ciri ideologi Marhenisme dan Soekarnoisme yang melekat pada citra partai. Pelembagaan partai politik itu sendiri ialah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya. Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua aspek dipersilangkan atau digabungkan maka pelembagaan partai politik dapat dilihat melalui aspek dimensi kesisteman, dimensi identitas nilai, dimensi otonomi dan dimensi citra publik.

1. Dimensi Kesisteman

Indikator derajat kesisteman suatu partai bervariasi yakni asal usul partai, penentu dalam pembuatan kebijakan, bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan. Pada kultur organisasi tradisional, jabatan pemimpin merupakan peran sentral dalam penguasaan pada suatu organisasi. Dengan kekuasaan yang dimilikinya maka seseorang tersebut dapat mengatur jalannya organisasi tersebut sesuai kehendaknya. Apalagi pemimpin yang memiliki legitimasi penuh karena disegani oleh anggotanya. Kecenderungan kultur organisasi tradisional ini terjadi di PDI Perjuangan Kabupaten Kendal sejak periode kepemimpinan Hendy Boedoro.

Dinamika organisasi selalu ditentukan oleh faktor intelektualitas, faktor financial, faktor kepemimpinan. Ketiga faktor ini selalu direpresentasikan oleh elit, bukan oleh masa dengan kemampuan yang beragam. Hal ini menyebabkan organisasi tersebut jatuh ke dalam kekuasaan oligarki. Organisasi yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki. Dapat dilihat pada PDI Perjuangan Kendal yang mana dinamika organisasi pada faktor kepemimpinan sangat dominan yang direpresentasikan oleh elite yang berkuasa. Sehingga partai ini jatuh ke dalam kekuasaan oligarki. Kekuasaan oligarki yang ada di PDI Perjuangan ini berbasis pada ikatan kekeluargaan.

Faktor kepemimpinan, menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang tokoh pada partai juga sangat kuat pengaruhnya. Seperti yang terjadi dalam kaderisasi politik di PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Aturan yang dapat dijalankan berdasarkan kehendak pemegang kekuasaan ini menunjukkan adanya elit politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Elit politik ini memainkan peran penting dalam alokasi sumber-sumber kekuasaan. Seperti jabatan yang dimiliki dan menempatkan orang-orang

yang dikehendaknya agar kekuasaan yang dimiliki tetap langgeng. Nilai lebih yang dimiliki elit ini yang dapat membuat mudah menanamkan pengaruh pada partai.

Elit sebagaimana kita fahami bisa dalam bentuk individu misal “orang kuat partai” atau dalam bentuk kelompok misal elite oligarki. Kehadiran mereka di partai politik aras lokal dapat dicermati dari tiga dimensi politik yaitu bagaimana mereka mendapatkan kekuasaan, bagaimana mereka menjalankan kekuasaan, bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan. Tahun 2001 merupakan pertama kalinya periode kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Kendal semenjak reformasi bergulir. Pada periode ini H.M. Salimun terpilih menjadi Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Namun ditengah jalan terjadi konflik internal pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Hal ini menunjukkan adanya perebutan kekuasaan dengan cara *konfrontatif* dalam mendapatkan kekuasaan.

Dengan aturan partai yang hirarkis ini memungkinkan adanya intervensi oleh DPD PDIP Jawa Tengah pada konflik PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Selain itu juga menunjukkan bahwa adanya oligarki politik pada tubuh PDI Perjuangan di tingkat lokal ini. Perebutan kekuasaan ini kental akan intrik politik dalam internal partai. Hal ini juga terkait untuk pemilihan kepala daerah pada tahun 2005. Sebelumnya Hendy Boedoro merupakan Bupati Kendal pada tahun 2000 yang menggantikan Drs. Djoemda Bupati Kendal periode 1999 yang meninggal dunia. Karena untuk dapat dicalonkan oleh PDI Perjuangan yang diprioritaskan adalah ketua partai, ketua DPRD dan bupati incumben dari PDI Perjuangan. Sehingga H.M Salimun sengaja dijatuhkan agar menghilangkan pesaing dalam internal partai untuk maju pada pilkada 2005.

Selain itu faktor finansial juga berpengaruh dalam konflik internal PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Faktor finansial ini dimiliki oleh Hendy Boedoro. Faktor finansial ini yang akhirnya dapat berpengaruh pada tahap selanjutnya yaitu ketika ada pemilihan untuk eksekutif dan legislatif. Dengan adanya pola politik transaksional ini menjadikan *cost* politik pada demokrasi di Indonesia sangat besar. Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa faktor finansial pada era sekarang ini memiliki peranan penting dalam dunia perpolitikan. Apalagi dalam hal perebutan kekuasaan, faktor finansial juga merupakan penunjang dalam meraih kekuasaan. Seseorang yang memiliki power dalam hal finansial maka dia dapat memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa faktor finansial sangat berpengaruh pada perpolitikan di Kendal pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Sehingga dapat terlihat bahwa kehadiran elit politik, berdasar bagaimana mereka mendapatkan kekuasaan pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal ini yaitu karena adanya budaya oligarki, sistem yang hirarki dan faktor finansial yang menunjang. Adanya budaya oligarki dan kuatnya faktor finansial ini yang menjadikan kehadiran elit politik ini sangat dominan. Yang kemudian akan berpengaruh pada bagaimana elite politik tersebut menjalankan kekuasaannya. Dari fenomena yang terdapat pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa, cara mendapatkan kekuasaan yang tidak baik akan berpengaruh pada kelembagaan partai politik tersebut. Kelembagaan politik yang dijalankannya ini juga bertujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Seperti adanya Widya Kandi istri Hendy Boendoro juga duduk dalam struktural DPC Kabupaten Kendal. Dan pada pemilu 2004 dengan sistem pemilu nomor urut tertutup dengan kuota 14 kursi untuk PDI Perjuangan, berhasil menjadikan Widya Kandi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Namun tahun 2005 ketika Hendy Boedoro terkena kasus korupsi oleh KPK. Kepemimpinan PDI Perjuangan Kabupaten Kendal digantikan oleh Widya Kandi sebagai pengisi jabatan kosong. Yang kemudian dilakukan rakercabsus dan Widia Kandi terpilih secara aklamasi. Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Kendal tidak ada yang berambisi menjadi ketua DPC karena menengok kemampuan yang dimilikinya. Sehingga pada proses rakercabsus PDI Perjuangan Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan mengikuti apa kata atasan. Di satu sisi kebulatan suara atau kesolidan pada partai politik memiliki dampak positif namun disisi lain memiliki dampak negatif. Dampak positif ini

menguntungkan kaum oligark karena meminimalis konflik internal pada partai dan lebih mudah untuk mengatur partai. Namun dampak negatifnya adalah berkembangnya budaya-budaya politik tradisional seperti patron-klien sehingga akan melanggengkan posisi kaum oligark.

Berdasar teori Jeffrey A. Winters, oligarki itu sendiri dibagi menjadi empat tipe. Tipe pertama yaitu oligarki panglima yang bentuk oligarkinya sangat ekstrim dan penuh konflik sesama kaum oligarkis. Kedua, oligarki penguasa kolektif, para oligark masih berperan secara pribadi dalam pemaksaan dan melakukan kekerasan. Ketiga, oligarki sultanistik yaitu adanya seorang oligarkis yang sangat dominan mengatur banyak aspek. Keempat, oligarki sipil yaitu kebersamaan oligarkis saling berbagi dengan sesamanya tanpa ada monopoli oleh satu pihak. Melihat fenomena yang terjadi dalam tubuh PDI Perjuangan berdasar teori ini dapat dikategorikan bahwa PDI Perjuangan memiliki tipe oligarki sultanistik. Yang mana adanya seorang oligark yang sangat dominan mengatur banyak aspek yang ada pada partai terutama untuk hal-hal strategis.

Bagi Michels para pemimpin politik karena diyakini dapat menjawab keawaman pengetahuan massa dalam isu politik, memperoleh kepercayaan membuat keputusan-keputusan penting yang berdampak luas dalam masyarakat. Kepercayaan ini lalu membuat para pemimpin politik bisa mengontrol proses rekrutmen pemimpin baru. Dengan dalih menjaga kelestarian proses suksesi, mereka biasanya mempersiapkan dan memilih pemimpin dari kalangan sendiri atau orang-orang yang kelak dapat meneruskan strategi dan kepentingannya. Fenomena ini dapat dilihat pada rekrutmen kepala daerah di PDI Perjuangan Kabupaten Kendal pada tahun 2005 dan 2010. Dalam hal kaitannya untuk strategi partai, anggota partai menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin yang dianggapnya memiliki nilai lebih.

Dalam kaitannya untuk pemilihan kepemimpinan partai dan pencalonan kepala daerah oleh PDI Perjuangan Kabupaten Kendal anggota partai menaruh kepercayaan penuh pada elit. Dari fenomena yang terjadi di PDI Perjuangan ini menunjukkan adanya pola kecenderungan yang mengarah pada budaya patron-klien. Hal ini juga dikarenakan kesadaran akan kepentingan untuk kemenangan partai lebih diprioritaskan. Yang mana hal strategis ini juga dalam kontrol pusat. Dengan mengutamakan strategi partai untuk meraih kekuasaan pada pemerintahan di Kabupaten Kendal kepentingan anggota partai dapat dikesampingkan. Sehingga meminimalis konflik internal partai, yang dapat berdampak buruk bagi strategi partai.

Nilai lebih yang dimiliki Hendy Boedoro ini adalah karena merupakan calon bupati incumben, faktor finansial yang dimiliki, komunikasi politiknya dan sebagai seorang eksekutif ini setidaknya Hendy Boedoro memiliki salah satu sumber kekuasaan politik yakni birokrasi. Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, Hendy Boedoro sebagai Bupati Kendal berhasil melakukan komunikasi politik yang baik dan intens dengan para kepala desa di Kabupaten Kendal. Kepala desa juga diyakini mampu menggerakkan elektabilitas politik. Sehingga dengan adanya strategi komunikasi politik yang baik dengan kepala desa di Kabupaten Kendal inilah yang diharapkan dapat meningkatkan elektabilitasnya.

Tidak hanya sebatas itu, kepala desa yang juga simpatisan PDI Perjuangan yang mendukung Hendy Boedoro ketika ada event pemilihan kepengurusan ini kemudian dijadikan kader partai. Dapat dilihat pula pada latar belakang pengurus partai pada kepengurusan DPC partai periode 2009. Pada periode tersebut ada nama-nama baru seperti H. Mundzakir, Suroto dan Hj. Nur Sikoh, S.Ag.M.Pd yang mana kader-kader tersebut memiliki latar belakang kepala desa. Hendy Boedoro sendiri terkenal baik dimata kepala desa, ramah, dermawan. Dalam rangka melakukan komunikasi politik Hendy Boedoro sering melakukan pertemuan dengan kepala desa seKabupaten Kendal.

Selain itu pada budaya politik tradisional, birokrasi yang korup dapat digunakan sebagai sumber kekuasaan politik. Hal ini juga terjadi pada pemerintahan di Kabupaten Kendal. Tersirat juga bahwa

keluarga Hendy Boedoro telah menguasai birokrasi yang ada di Kabupaten Kendal. Hal ini terbukti ketika pilkada 2010 Widya Kandi berhasil memenangkan kursi kepala daerah padahal suaminya yaitu Hendy Boedoro bermasalah dengan KPK. Selain itu, nilai lebih yang dimiliki Widya Kandi yakni karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal yang sudah dikenal oleh masyarakat, komunikasi politiknya dan faktor finansial yang dimilikinya.

Pemimpin memiliki banyak sumber daya yang sangat bermanfaat sehingga sulit tertandingi oleh anggota yang berusaha ikut bagian mengambil kebijaksanaan. Dengan nilai lebih yang dimiliki oleh elit inilah yang menjadikan ketergantungan partai pada tokoh-tokoh tertentu. Di satu sisi memang memberikan nilai positif bagi partai. Namun disisi lain partai politik gagal mewujudkan sistem yang demokratis. Sehingga pada pelembagaannya, elit politik ini mendominasi atas kekuasaan yang didapatkannya dan menguntungkan kaum oligark di dalamnya. Ini menunjukkan gagalnya fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik.

2. Dimensi Identitas Nilai

Dimensi identitas nilai, sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural lebih bersifat ideologis. Yang mana anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai. Pemahaman kader terhadap fungsi partai mutlak diperlukan untuk membangun aspek ini. Pada dimensi identitas nilai, PDI Perjuangan memiliki basis pendukung yang spesifik. Pembangunan ideologi PDI Perjuangan ini cukup bagus dengan ideologi Soekarnoisme, Marheanisme yang melekat pada citra PDI Perjuangan. Apalagi dengan jargon yang diusungnya yaitu “Partaine Wong Cilik”. Ini memiliki ciri kas tersendiri pada PDI Perjuangan yang akan mendatangkan simpatisan dengan ideologi yang sama.

Jika dilihat dari dimensi identitas nilai, PDI Perjuangan ini memiliki nilai lebih dibandingkan dengan partai lainnya. Sebagai partai nasionalis yang jelas berbeda dengan partai agamis yang hanya memiliki segmentasi dukungan tertentu. PDI Perjuangan dapat menampung simpatisan dari berbagai segmen seperti berbagai suku bangsa agama dan ras. Selain dari segmen yang terbuka, dengan melekatnya ideologi Marheanisme dan Soekarnoisme ini menjadikan nilai lebih pada PDI Perjuangan. Sehingga simpatisan partai yang berdasar ideologi yang melekat pada PDI Perjuangan ini akan bersifat loyal. Walaupun pada pelembagaannya hirarki yang dijalankan PDI Perjuangan ini sangat kuat dan sentralistis. Namun anggota partai tetap loyal karena kecintaannya pada ideologi partai. Kharismatik yang dimiliki Soekarno ini sangat berpengaruh. Sehingga dalam pelembagaannya kepemimpinan trah Soekarno tetap dijaga.

Akan tetapi sangat disayangkan ketika terjadi kegagalan dalam kaderisasi dan rekrutmen politik di PDI Perjuangan Kabupaten Kendal sebagaimana fungsi partai politik. Hal ini tercermin dari pola perilaku elit dalam pelembagaan PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Nilai-nilai materi kaderisasi seperti penanaman kebangsaan dan ideologi-ideologi partai tidak diwujudkan oleh elit. Sehingga tidak terciptanya pelembagaan yang sempurna pada aspek ini.

3. Dimensi Otonomi

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai. Jika dilihat dari dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural. PDIP Kendal tidak memiliki ketergantungan terhadap faktor eksternal partai. Akan tetapi pada PDI Perjuangan Kabupaten Kendal ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap elit partai. Keputusan partai ditentukan oleh aktor internal partai itu sendiri. Sehingga PDI Perjuangan sudah cukup otonom dalam menjalankan kepartaiannya.

4. Dimensi Citra Publik

Pada aspek attitudinal dalam dimensi eksternal. Sejauh mana partai mampu tertanam dalam ingatan masyarakat dan diakui kiprahnya oleh masyarakat. Aspek ini memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap tingkat elektabilitas. Berangkat dari penterjemahan ideologi, visi dan misi partai merupakan langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat ingatan masyarakat. Dalam hal ini, PDI Perjuangan berhasil memperkuat ingatan masyarakat dengan ideologi dan jargon yang diusungnya. Ini dapat terlihat dari hasil perolehan suara PDI Perjuangan terutama pada Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal. Namun, dengan dinamika zaman hal ini perlu selalu ditanamkan pada kader-kader partai agar nilai-nilai identitas partai dapat selalu terimplementasi dengan baik. Agar citra publik terhadap partai tetap positif sehingga akan meningkatkan elektabilitas partai.

PENUTUP

Dari hasil penelitian mengenai sistem rekrutmen dan kaderisasi politik PDI Perjuangan era reformasi di Kabupaten Kendal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kecenderungan ke arah budaya oligarki. Hal ini dapat dilihat dengan adanya dominasi kepemimpinan oleh keluarga Hendy Boedoro dalam kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Kendal. Dengan adanya elit politik ini menjadikan ketergantungan partai terhadap tokoh-tokoh tertentu. Dan pada akhirnya partai politik gagal melaksanakan fungsinya dalam hal rekrutmen dan kaderisasi politik yang baik dengan cara terbuka untuk mewujudkan ideologi dan platform partai. Karena hanya terpusat pada perebutan kekuasaan politik semata. Sehingga kiprah PDI Perjuangan tersebut menunjukkan kegagalan partai politik sebagai agen konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan sistem demokrasi yang baik secara prosedural maupun substansial, hendaknya partai-partai politik menjadikan ini semua sebagai pembelajaran untuk bersaing secara sportif dalam dunia perpolitikan. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran politik dengan adanya persaingan yang ketat dan sehat pada internal partai. Guna menciptakan pemimpin-pemimpin yang berlandaskan pada ideologi dan platform partai. Sehingga orientasi kader yang akan menempati jabatan legislatif dan eksekutif tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan politik semata. Akan tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E. 1988. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: Cv. Rajawali.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto. 1990. *Elit, Masa dan Konflik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, UGM.
- _____. 2005. *Kekuasaan Elite : Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PLOD UGM.
- Huntington, Samuel P. 2004. *Tertib Politik: Pada Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mangkubumi. 1989. *Kerangka Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.

- Mas'ood, Mohtar dan MacAndrews, Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukarna. 1992. *Sistem Politik Indonesia III*. Bandung: Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Varma, SP. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Vicky Randall and Lars Svasand. *Party Politics* Vol. 8 Januari No. 1. 2002.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka.